

SKRIPSI



MANAJEMEN POST AUDIT ATAS SASARAN EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KETAATAN PERATURAN PADA INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Disusun Oleh :

Nama : Hasni Rahayu Nurhidayah

NPM : 2112121138

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

PROGRAM SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, 2026



**MANAJEMEN POST AUDIT ATAS SASARAN
EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA
KETAATAN PERATURAN PADA INSPEKTORAT
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan**

Oleh :

Nama : Hasni Rahayu Nurhidayah
NPM : 2112121138
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Hasni Rahayu Nurhidayah
NPM : 2112121138
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara
JUDUL : Manajemen Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi
Dan Efektivitas Serta Ketaatan Peraturan Pada Inspektorat
Badan Standardisasi Nasional

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 16 Juni 2026

Pembimbing



(Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA
LAN Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

Ketua merangkap Anggota



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

Sekretaris merangkap Anggota



(Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si)

Anggota



(Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasni Rahayu Nurhidayah

NPM : 2112121138

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **“Manajemen Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas Serta Ketaatan Peraturan Pada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam kesadaran dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 18 Juni 2026

Peneliti,



Hasni Rahayu Nurhidayah

NPM: 2112121138

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Skripsi yang berjudul “Manajemen Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas Serta Ketaatan Peraturan Pada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, sayang dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dengan tulus dalam mencurahkan doa, kasih sayang, kesabaran, memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama ini

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Seluruh Pimpinan Tinggi di Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA selaku dosen pembimbing;
3. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si selaku dosen pembahas;
4. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku dosen pembahas;
5. Para dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu memberikan bimbingan serta ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Keluarga;
7. Rekan-rekan kerja di Inspektorat BSN.
8. Semua pihak yang membantu kelancaran penelitian skripsi penulis yang tidak disebutkan dan disebutkan. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik dari dosen dan semua pihak sangat penulis harapkan dan akan penulis jadikan sebagai sarana introspeksi dan peningkatan

kualitas laporan ataupun tulisan yang akan penulis buat dikemudian hari. Besar harapan penulis, sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Somoga Alloh SWT senantiasa meringankan langkah-langkah kita menuju ridho-Nya, Aamiin..

Peneliti,



Hasni Rahayu Nurhidayah

ABSTRAK

MANAJEMEN POST AUDIT ATAS SASARAN EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KETAATAN PERATURAN PADA INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Hasni Rahayu Nurhidayah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi – fungsi manajemen dalam Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas Serta Ketaatan Peraturan. Adapun aspek-aspek yang menjadi *tools* dalam penelitian ini yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data serta dengan metode wawancara dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan kepada 5 (lima) orang *key informant*, telaah dokumen difokuskan pada dokumen – dokumen terkait dengan aspek – aspek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi – fungsi manajemen dalam Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas Serta Ketaatan Peraturan pada Inspektorat BSN sudah berjalan secara optimal namun masih perlu diperkuat. Penyusunan tim audit dan pembagian tugas pekerjaan belum sesuai gugus tugas. Program kerja audit sudah terlaksana dan auditi sudah menindaklanjuti hasil audit, namun masih ada beberapa yang belum melaksanakan tindak lanjut. Sistem kendali mutu dalam audit sudah dilaksanakan, serta telah dilakukan penilaian intern dan ekstern (*peer review*) terhadap mutu audit.

Kata Kunci: Fungsi Manajemen; Post Audit; Ekonomis; Efisiensi; Efektivitas; Ketaatan terhadap Peraturan; Kualitas Audit.

ABSTRACT

MANAGEMENT OF POST AUDIT ON ECONOMY, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, AND COMPLIANCE WITH REGULATIONS AT THE INSPECTORATE OF THE NATIONAL STANDARDIZATION BODY OF INDONESIA

Hasni Rahayu Nurhidayah

This study aims to determine the management functions applied in the Post Audit of Economy, Efficiency, Effectiveness, and Compliance with Regulations. The aspects examined in this study include planning, organizing, implementation, and controlling. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and document reviews. Interviews were conducted with five key informants, while document analysis focused on documents related to the research aspects. The results indicate that the management functions in the Post Audit of Economy, Efficiency, Effectiveness, and Compliance with Regulations at the Inspectorate of the National Standardization Body (BSN) have generally been implemented optimally; however, several aspects still require improvement. The establishment of audit teams and the distribution of tasks have not fully aligned with the assigned duties and functions. Audit programs have been implemented effectively and audit findings have been followed up, although some findings have not yet received adequate corrective actions. The quality control system in auditing has been implemented, and both internal and external assessments (peer reviews) of audit quality have been conducted.

Keywords: *Management Functions; Post Audit; Economy; Efficiency; Effectiveness; Compliance with Regulations; Audit Quality.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	13
B. Konsep Kunci	38
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Teknik Pengumpulan Data	41
a. Wawancara (<i>interview</i>).....	41

b. Telaah Dokumen	43
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Penyajian Data.....	47
B. Pembahasan.....	50
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jenis Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 - 2025.....	10
3.2. Daftar <i>Key Informant</i>.....	42
4.3. Daftar Pegawai Inspektorat BSN	48
4.4. Objek Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Tahun 2024	49
4.5. Temuan BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BSN	49
4.6. Peta Jabatan Auditor Inspektorat BSN	57
4.7. Keaktifan Auditor Inspektorat BSN	58
4.8. Daftar Penugasan Auditor	67

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Kertas Kerja Pemahaman Proses Bisnis.....	5
1.2. Surat Tugas Tambahan Waktu pelaksanaan Post Audit atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas serta Ketaatan pada Peraturan Tahun Anggaran 2024.....	6
1.3. Rekomendasi Auditor berdasarkan Laporan Hasil Audit Tahun 2025	8
1.4. Peta Jabatan Inspektorat	9
2.5. Model Berpikir	39
4.6. Struktur Organisasi Inspektorat BSN	48
4.7. Surat Penugasan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Tahun 2025	55
4.8. Pembagian Tugas dalam Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan	59
4.9. Surat Penugasan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Lanjutan.....	65
4.10. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan.....	69

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperlukan pembentukan sistem pengendalian intern (SPI) di lingkungan pemerintah. Definisi SPI menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

Suatu prosedur menyeluruh yang mencakup tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten oleh manajemen dan seluruh staf untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan.

Pelaksanaan SPI pemerintah perlu didukung peran pengawasan intern yang pelaksanaannya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/2023 menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang juga dikenal sebagai APIP, terdiri atas organisasi yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, kedudukan dan peranan APIP menjadi bagian terpenting untuk memberikan keyakinan memadai dan saran perbaikan dalam siklus pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan APIP di setiap tingkatan pemerintahan.

Langkah-langkah berikut diperlukan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat beroperasi secara efektif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. menjamin bahwa instansi pemerintah mematuhi peraturan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mencapai tujuan;
- b. meningkatkan kesadaran akan potensi masalah serta menjadikan pengelolaan risiko lebih efektif; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan instansi pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 mengatur tentang penguatan sistem pengendalian internal dan pemastian pengawasan internal yang andal demi mewujudkan mandat kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prosedur pengawasan pemerintah (APIP) yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memantau program-program yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dan negara serta efektivitas belanja daerah dan negara. Audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan internal lainnya mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pendapatan serta belanja negara, termasuk pembangunan nasional dan kegiatan yang didanai seluruhnya atau sebagian oleh bantuan keuangan dari negara. Hal ini juga mencakup badan usaha dan organisasi di mana Pemerintah Pusat memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya, serta pertanggungjawaban pembiayaan keuangan negara.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang diwakili oleh Inspektorat, memegang peran yang krusial dan strategis, baik dalam kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab manajemen maupun dalam upaya mewujudkan visi, maksud, dan tujuan pemerintah. APIP merujuk pada entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan, dan terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sering dikenal sebagai BPKP, yang dimana badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Utama (Ittama), yaitu inspektorat yang melapor dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang melapor serta bertanggungjawab kepada Gubernur.
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dapat mengurangi kecurangan dan menghasilkan keluaran substansial yang menyediakan informasi bagi auditor eksternal serta entitas eksekutif dan legislatif, sehingga pada akhirnya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas di masa mendatang.

Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BSN mempunyai program penguatan pengawasan internal. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat BSN sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Internal sebagai berikut (BSN, 2016:4):

1. Meningkatkan kepatuhan, kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tanggung jawab dan pencapaian tujuan organisasi;
2. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tanggung jawab organisasi; serta
3. Menyempurnakan tata kelola pelaksanaan tanggung jawab organisasi guna menjadi terbebasnya organisasi dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu aspek pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat BSN adalah Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan. Kegiatan audit ini merupakan rangkaian dari Program pengawasan tahunan Inspektorat tahun 2025 yang termasuk dalam lingkup *assurance*. Audit ini meliputi pelaksanaan anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Cakupannya meliputi evaluasi terhadap dimensi keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan selama pelaksanaan anggaran di BSN. Audit ini memeriksa pelaksanaan anggaran belanja

barang dan belanja modal di seluruh unit kerja BSN. Tujuan audit ini adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BSN. Dalam pelaksanaannya, auditor mematuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan yaitu persiapan penugasan, penentuan tujuan dan lingkup, pemahaman terhadap kegiatan operasional bisnis auditi, serta identifikasi dan penilaian risiko dan pengendalian yang signifikan merupakan bagian dari tahap perencanaan audit, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.

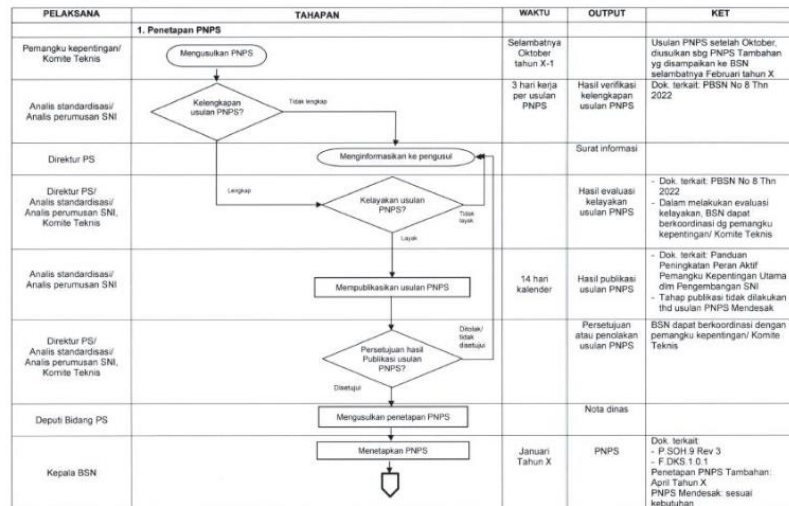
Salah satu tahapan penting dalam perencanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, dan Ketaatan Peraturan adalah memahami proses bisnis auditi. Pemahaman terhadap proses bisnis bertujuan agar auditor mengetahui alur pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme pengendalian intern, serta risiko-risiko yang melekat pada setiap tahapan proses. Namun, dalam praktik pelaksanaan audit di BSN sering dijumpai kondisi di mana auditor belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses bisnis unit kerja yang diaudit. Akibatnya, pada saat pelaksanaan audit, auditor membutuhkan waktu tambahan untuk mempelajari alur kegiatan, meminta penjelasan berulang kali kepada auditi, serta menyesuaikan kembali prosedur audit yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pada prinsipnya, proses bisnis telah dipersiapkan sebelum pelaksanaan Post Audit atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas serta Ketaatan pada Peraturan, seperti terlampir di bawah ini:

Gambar 1.1

Kertas Kerja Pemahaman Proses Bisnis

KERTAS KERJA PEMAHAMAN PROSES BISNIS

1. Berdasarkan analisa dokumen didapati bahwa terdapat revisi SOP terkait Pengembangan SNI yang digunakan pada tahun 2024, yaitu P.DKS.1 Rev 2 Pengembangan SNI.



*Sumber : Kertas Kerja Post Audit atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas
serta Ketaatan pada Peraturan 2025*

b. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Post-audit terkait aspek ekonomis, efisien, dan efektif (3E) serta kepatuhan terhadap regulasi, APIP mengevaluasi, menganalisis, dan memverifikasi bukti yang telah dikumpulkan dengan menekankan pada kepatuhan, aspek 3E, dan capaian kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan, menggunakan model yang telah disetujui pada tahap perencanaan. Selanjutnya, capaian kinerja tersebut diidentifikasi dan diperiksa berdasarkan kategori Indikator Kinerja serta dicatat dalam kertas kerja audit.

Dalam praktik pelaksanaan audit sering dijumpai kondisi di mana auditi belum menyiapkan dokumen dan bukti pendukung secara memadai sebelum audit dilaksanakan. Kondisi ini umumnya disebabkan karena

dokumen belum terdokumentasi secara sistematis, tersimpan pada beberapa unit kerja yang berbeda, atau bahkan masih harus disusun kembali menjelang pelaksanaan audit. Kondisi tersebut mengakibatkan proses audit menjadi kurang efisien. Auditor harus menunda prosedur pengujian yang telah dijadwalkan, melakukan permintaan dokumen secara berulang, serta melakukan klarifikasi tambahan terhadap dokumen yang baru disampaikan. Hal ini terlihat dari adanya tambahan surat tugas tambahan. Berikut merupakan bukti surat tugas tambahan waktu pelaksanaan Post Audit atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas serta Ketaatan pada Peraturan Tahun Anggaran 2024:

Gambar 1.2

**Surat Tugas Tambahan Waktu pelaksanaan Post Audit atas
Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas serta Ketaatan pada
Peraturan Tahun Anggaran 2024**



**BADAN
STANDARISASI
NASIONAL**

Jl. Kuningan Barat Raya No.1A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710
Telp: (021) 3825 9319, e-mail: cs@bsn.go.id, www.bsn.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: 35A/ST/NS/03/2025

Sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, Ptl. Inspektur Badan Standardisasi Nasional dengan ini menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dibawah ini:

No.	Nama	NIP	Peran
1.	Mu	11	Penanggung Jawab
2.	A.	8	Pengendali Teknis
3.	I	2	Ketua Tim
4.	Di	2	Anggota Tim
5.	M	1	Anggota Tim
6.	A	32	Anggota Tim
7.	B	31	Anggota Tim
8.	Pl	35	Anggota Tim

Untuk melaksanakan Post Audit atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, serta Ketaatan pada Peraturan TA 2024 (tahap pelaksanaan) Lanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 21 Maret 2025. Hasil pelaksanaan Post Audit atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, serta Ketaatan pada Peraturan TA 2024 (tahap pelaksanaan) Lanjutan dilaporkan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional melalui Inspektur selaku penanggung jawab kegiatan

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 14 Maret 2025
Inspektur,



Murni Aryani

Sumber : Surat Tugas Tambahan Waktu pelaksanaan Post Audit atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas serta Ketaatan pada Peraturan Tahun Anggaran 2024

c. Pelaporan

Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan serta merumuskan temuan dan rekomendasi, APIP wajib menyampaikan hasil audit yang mencakup aspek keekonomisan, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan, kepada pimpinan atau manajemen pihak yang diaudit. Sebelum melaksanakan pertemuan penutup dengan pihak yang diaudit, APIP perlu melakukan pembahasan internal. Seluruh anggota tim audit wajib mengikuti pembahasan internal ini guna memastikan bahwa pemberitahuan hasil audit (kesimpulan awal) didukung oleh bukti yang relevan, kompeten, dan memadai. Selain itu, diskusi penutup yang formal dengan pihak yang diaudit diperlukan untuk mendapatkan tanggapan atas kesimpulan yang diperoleh dari penyampaian hasil audit. Diskusi penutup tersebut harus dilaksanakan secara efisien dan menghasilkan kesepakatan bersama.

Namun pada realitasnya, manajemen post audit atas sasaran ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan peraturan pada Inspektorat BSN masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Proses pemantauan penyelesaian rekomendasi seringkali mengalami keterlambatan akibat mekanisme koordinasi yang bersifat konvensional dan kurangnya koordinasi tindak lanjut antar pihak Inspektorat dengan unit kerja di BSN selaku auditi. Akibatnya, terdapat rekomendasi temuan yang menggantung atau terlambat diselesaikann dari tenggat waktu yang telah ditentukan. Apabila kelemahan dalam manajemen post audit atas sasaran ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan peraturan ini terus dibiarkan tanpa adanya evaluasi, maka fungsi pengawasan ini dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Keterlambatan penyelesaian

rekomendasi audit berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan lembaga serta mempengaruhi indeks reformasi birokrasi BSN. Berikut contoh rekomendasi dari auditor dari dokumen Laporan hasil Audit Tahun 2025:

Gambar 1.3.

Rekomendasi Auditor berdasarkan Laporan Hasil Audit Tahun 2025

Tanggapan Auditor:

- 1) Penyebabnya adalah belum ada perencanaan jangka menengah dan jangka panjang terkait penetapan jenis produk. Atas tanggapan Biro MKOK terkait penetapan jumlah jenis produk akan dilakukan audit tambahan.
- 2) Belum ada database terkait penetapan jenis produk yang digunakan oleh seluruh unit kerja BSN.

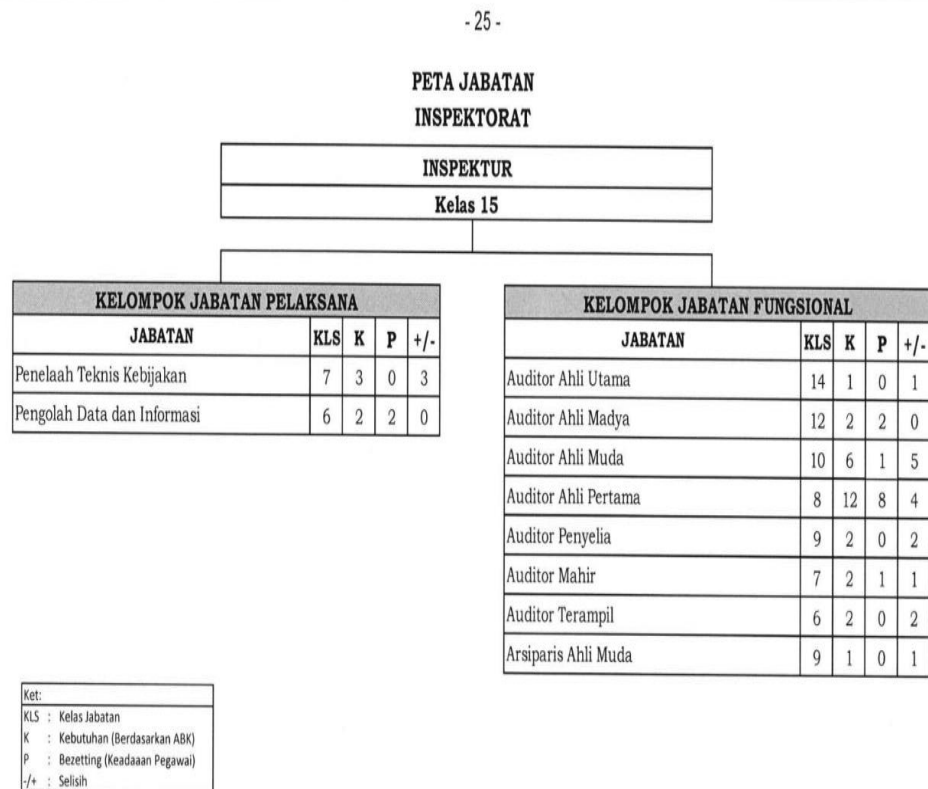
Rekomendasi

Kepala Badan agar menyediakan database terkait penetapan jenis produk yang digunakan oleh seluruh unit kerja BSN.

*Sumber : Laporan Hasil Post Audit atas Sasaran Ekonomis,
Efisiensi, Efektivitas serta Ketaatan pada Peraturan Tahun Anggaran
2024*

Selain itu, berdasarkan rencana penempatan audit Inspektorat untuk tahun 2025, tidak terdapat alokasi tugas pengendali mutu yang akan dilaksanakan oleh Auditor Ahli Utama (Pejabat Fungsional). Hal ini dilakukan dengan melanggar Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur pola hubungan dan uraian fungsi bagi jabatan pimpinan, administrator, pengawas, koordinator, dan sub-koordinator di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini terlihat pada peta jabatan Inspektorat BSN tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 1.4.
Peta Jabatan Inspektorat



Sumber: Peta jabatan Inspektorat 2025

Hasil dari pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan merupakan peringatan dini terhadap peraturan perundang-undangan di BSN dan hanya berupa rekomendasi saran perbaikan untuk meningkatkan tata kelola organisasi. Dengan adanya perbaikan terhadap sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diharapkan dapat meningkatkan keandalan Laporan Keuangan BSN.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2024 sampai dengan 2025 menunjukkan peningkatan temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BSN.

Tabel 1.1

Jenis Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 - 2025

Jenis Temuan	Tahun	
	2024	2025
A. Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	-	2
a. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	-	-
b. Administrasi	-	2
B. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	1	1
a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	-	-
b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	-	-
c. Kelemahan struktur pengendalian intern	1	1
Jumlah (A+B)	1	3

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada BSN Semester 1 Tahun 2025.

mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan tidak tercapai.

Hal ini diduga terjadi antara lain karena:

1. Perencanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan belum mempertimbangkan terkait risiko audit kepada auditi, tetapi masih berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK.
2. Pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan bersamaan dengan pelaksanaan penugasan lain yaitu evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lainnya.

3. Tidak dilakukan revidi atas hasil akhir pelaksanaan penugasan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan.

Audit merupakan sarana penting untuk menilai efektivitas operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal. Audit bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan audit keuangan, yang umumnya berfokus pada dokumen keuangan. Dengan melaksanakan audit secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya selaras dengan tujuan fungsional serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, audit berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang berkaitan dengan penyediaan layanan maupun perolehan keuntungan finansial.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas diketahui proses manajemen dalam pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan pada Inspektorat BSN masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian terkait bagaimana manajemen post audit atas sasaran ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan peraturan dijalankan menjadi mendesak untuk dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Berdasarkan paparan yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Pada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan fokus permasalahan: Bagaimana Manajemen Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Pada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan pada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ranah akademis maupun praktis.

a. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Akademik

Dengan mengetahui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Pada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Manajemen Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan.

b. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Praktis

Sebagai informasi dan bahan masukan kepada Inspektorat BSN dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan di Badan Standardisasi Nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Manajemen Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan dengan melihat empat aspek penelitian yang merupakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada aspek perencanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan, Inspektorat BSN telah memiliki ukuran yang jelas. Terkait penyusunan program kerja Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan didasarkan atas penilaian risiko serta pada pengalaman auditor dan hasil temuan pemeriksaan BPK.

Kedua, pada aspek pengorganisasian, penyusunan Tim Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Inspektorat BSN belum sesuai dengan gugus tugas. Tim audit yang disusun hanya terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua tim dan anggota tim. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah auditor serta jenjang jabatan auditor tertinggi di Inspektorat baru sampai pada Auditor Madya belum mencapai jenjang Auditor Utama selaku Pengendali Mutu. Selain itu, Dalam pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan, telah memperhatikan independensi dan objektivitas auditor. Pengendali Teknis dan Ketua Tim telah melakukan pembagian objek audit dan auditi kepada auditor berdasarkan penilaian terhadap potensi benturan kepentingan antara auditor dan auditi, selain itu independensi juga ditunjukkan dengan kepemilikan pakta integritas.

Ketiga, dalam aspek pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan realisasi program kerja Post

Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini disebabkan karena beberapa auditi tidak memberikan dokumen audit kepada auditor secara tepat waktu dan terdapat berbagai penugasan pada tim audit saat pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan.

Keempat, dalam aspek pengendalian, pemantauan tindak lanjut hasil Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan telah dilaksanakan dengan presentase sebesar 80%. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan sudah dilakukan pengendalian mutu oleh pengandali teknis. Selain itu, penilaian intern dan ekstern (*peer review*) terhadap mutu Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan pada Inspektorat BSN dilakukan melalui penilaian intern dan ekstern (*peer review*) terhadap mutu Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan pada Inspektorat BSN telah dilaksanakan yaitu pada kegiatan Audit Internal BSN. Selain itu, penilaian ekstern juga sudah dilaksanakan dalam bentuk telaah sejawat eksternal oleh tim auditor dari BPOM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti akan memberikan saran yang menjadi prioritas dari sintesis pemecahan masalah perlu dilakukan peningkatan sebagai berikut:

1. Perlu disusun mekanisme oleh auditor untuk menentukan besarnya sample audit dan sasaran objek audit agar data yang dihasilkan dapat merepresentasikan keseluruhan objek audit. Dalam hal ini, diperlukan komitmen dari Inspektur dalam penyusunan mekanisme tersebut.
2. Inspektorat BSN perlu mengkomunikasikan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BSN mengenai kebutuhan penempatan atau perekrutan Auditor Utama sebagai tim pengendali mutu.

Dengan demikian, fungsi pengendalian mutu dapat berjalan lebih optimal sehingga kualitas pelaksanaan post audit dan nilai tambah yang diberikan kepada organisasi semakin meningkat.

3. Inspektorat BSN perlu melakukan penguatan mekanisme penyampaian dokumen audit, seperti penetapan batas waktu yang jelas, monitoring secara berkala, serta pemberian pengingat kepada auditi guna meminimalkan keterlambatan penyampaian dokumen pendukung. Dengan tersedianya dokumen secara tepat waktu, seluruh prosedur dalam Program Kerja Post Audit terhadap Peraturan dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, dan Ketaatan Peraturan perlu terus ditingkatkan oleh Inspektorat BSN untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi audit telah dilaksanakan secara tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan tujuan perbaikannya. Melalui pemantauan yang berkesinambungan, Inspektorat BSN dapat memaksimalkan fungsi audit internal serta meningkatkan kualitas pengawasan yang selaras dengan hasil penilaian intern maupun ekstern, sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirullah dan Budiyo, Haris (2004), Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi (2008), Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media F. Ilmu Pendidikan UNY
- Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (2014), Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, Jakarta: Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan (2017), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007), Manajemen Pengawasan, Ciawi: Pusdiklatwas BPKP
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2014), Audit Internal, Ciawi: Pusdiklatwas BPKP
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2014), Manajemen Pemerintah Pusat, Ciawi: Pusdiklatwas BPKP
- Creswell, J. W. (2018), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, Edisi 5, California: Sage.
- Dien, Fahmi, Juli (2025), manajemen audit Perusahaan: Prosedur, Inovasi dan Implementasi, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Dwiyanto, A. (2022). Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia. Gadjah Mada University Press
- Guy, D. M. (1981). Statistical Sampling in Auditing. John Wiley & Sons.
- Halim, A. (2001). Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan (Edisi 3). UPP AMP YKPN.
- Hamidi (2008), Metode Penelitian Kualitatif, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Handoko, T. Hani (2012), Manajemen Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta : BPFE

- Hasibuan, H.Malayu S.P (2009), Manajemen sumber daya manusia, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, H.Malayu S.P (2016), Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara
- Henry, N. (2022). Public Administration and Public Affairs (13th ed.). Routledge.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2008). Standar Audit 530: Sampling Audit. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat.
- Kumaat, Valery G (2011), Internal Audit, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. LAN.
- Mardiasmo (2018), Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moeller, R. (2016). Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body Of Knowledge. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2010). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. McGraw-Hill
- Sasono, E. (2021). Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Utama.
- Siswandi (2011), Aplikasi manajemen perusahaan : analisis kasus dan pemecahannya, Edisi Ke-3. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sugiyono (2005), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah, Kurniawan (2008), Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Tjokroamidjojo, B. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES.
- Ulum, Ihyaul (2009), Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Bumi Aksara
- Widiyanto, M. A. (2016). Statistika Penelitian Pendidikan. Deepublish.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/pmk.07/2023 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Koordinator, dan Subkoordinator Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2017 - 2019

C. Dokumen

Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d Semester 1 Tahun 2024 Pada Badan Standardisasi Nasional

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025

Laporan Hasil Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Semester 1 Inspektorat Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2024

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Keuangan Semester 1 Inspektorat Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2024

Peta Jabatan Inspektorat Badan Standardisasi Nasional

Piagam Audit Internal Inspektorat Badan Standardisasi Nasional tahun 2016

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2024

Program Kerja Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Semester 1 Inspektorat Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2024

Surat Penugasan Post Audit Atas Sasaran Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta Ketaatan Peraturan Semester 1 Inspektorat Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2024

D. Jurnal

Dwi, Dewi dan Andri (2023), "Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Vol. 4, No. 2

Raharja, Surya (2008), "Studi Empiris Mengenai Penerapan Metode Sampling Audit Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Metode Sampling Audit Oleh Auditor Bpk" Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2008, Hal. 54 - 66

Suharli, Michael (2011), "Audit Finansial, Audit Manajemen, Dan Sistem Pengendalian Intern"

Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1–11.

Zellatifanny, D. A., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskriptif dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A